

# EVALUASI KEBIJAKAN REVITALISASI WISATA PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI SETU BABAKAN JAKARTA SELATAN

Alya Nadhifah Yasmin<sup>1</sup>, Herbasuki Nurcahyanto<sup>2</sup>, Aufarul Marom<sup>3</sup>

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

*Efforts to develop the Betawi Cultural Village Setu Babakan Tourist Area in South Jakarta by implementing the Revitalization Policy. The revitalization policy has been in place for five years and no policy evaluation has been carried out. The aim of this research is to analyze the evaluation of revitalization policies at the Setu Babakan Betawi Cultural Village. With a descriptive qualitative research method tested through policy evaluation theory by W. Dunn including Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, and Accuracy and data collection through observation, interviews, literature study and documentation. The results of this research found that the implementation of the Setu Babakan Betawi Cultural Village area revitalization policy implemented by the Area Management Unit was going well with the results of the revitalization still being slow in development, the adequacy of facilities being poor, the distribution of information both vertically and horizontally. Based on these six indicators, things are still found that need to be improved in the formulation of the implementation of revitalization policies. The highest result based on the policy evaluation theory test using six indicators is Effectiveness, Responsiveness and Accuracy carried out by the Setu Babakan Betawi Cultural Village Management Unit in South Jakarta, namely "Good". Analysis related to inhibiting factors in managing tourist areas is based on research results, namely communication, resources, community participation and the bureaucratic structure of the Area Management Unit. The development of revitalization results continues and is considered slow by the management. Improvements in communication and management of human resources and costs are needed for the next revitalization policy at the Setu Babakan Betawi Cultural Village.*

**Keywords:** Policy Evaluation, Revitalization Policy, Betawi Cultural Village Area

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

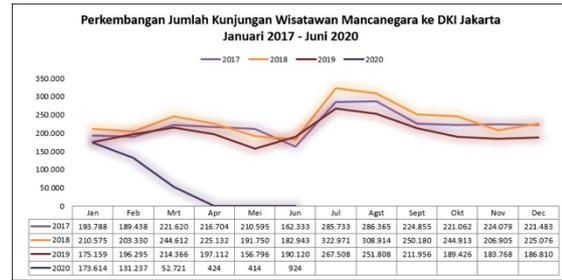
Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan yang terletak di Jakarta Selatan, sebagai perwujudan kekayaan budaya Betawi, mengalami proses

revitalisasi dimulai beberapa tahun yang lalu. Langkah-langkah kebijakan tersebut mencakup transformasi fisik, pemberdayaan masyarakat, dan perubahan kebijakan lainnya yang berpotensi membentuk kembali wajah dan karakter kawasan tersebut.

Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan saat ini disorot sebagai bagian penting dari warisan budaya ibu kota. Sebagai destinasi yang kaya akan tradisi dan keunikan, Setu Babakan telah menjadi pusat perhatian bagi pemerintah dan masyarakat yang peduli terhadap pelestarian budaya lokal. Namun, seiring berjalannya waktu, kelestarian pariwisata budaya lokal kian menyusut.

Perkembangan cagar wisata budaya di Indonesia telah mencapai 1.119 cagar budaya dengan persebaran yang tidak merata. Selain itu cagar budaya lainnya sekitar 196 objek yang ditetapkan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Wisata budaya merupakan bentuk pemerintah pusat dengan daerah sebagai implementasi desentralisasi dan otonomi daerah. Usaha pemerintah daerah dalam mengelola dan memberikan peluang wisata di daerahnya diberikan seluasnya. Pariwisata secara nyata dapat memberikan partisipasi dalam pendapatan negara, pembangunan, tingkat ekonomi dan kelestarian budaya setempat. Pemerintah dalam aksinya mengeluarkan kebijakan publik sebagai solusi.

**Gambar 1. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan di DKI Jakarta Tahun 2020**



*Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2020 dalam Rachmawati & Alhazami (2022)*

Berdasarkan gambar 1.0 diatas bahwa kunjungan wisatawan pada tahun 2020 turun sangat cepat dikarenakan pandemic covid-19. Wisata yang menurun mengakibatkan menurunnya pendapatan negara. Wisata yang ada di perkotaan sering kali minim daya tarik. Sehingga pemerintah DKI Jakarta menggali potensi wisata melalui pelestarian budaya. Pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal belum sepenuhnya diperhatikan di daerah perkotaan. Kegiatan pariwisata ini menggunakan pendekatan budaya di DKI Jakarta adalah melestarikan budaya Betawi. Sejak dahulu, Suku Betawi dapat dikatakan sebagai suku asli yang mendiami wilayah Jakarta dan sekitarnya. Namun, tidak ada konsensus yang jelas tentang jumlah suku Betawi yang ada saat ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlah suku Betawi berkisar antara 2-3 juta orang, sementara yang lainnya 3 menyatakan bahwa hanya ada sekitar 1 juta orang suku Betawi yang tersisa.

**Tabel 1. 1 Jumlah Suku Bangsa di Indonesia Tahun 2022**

Suku	Jumlah
Jawa	95.000.000
<b>Betawi</b>	<b>6.807.968</b>
Sunda	36.701.670
Lainnya	750.142
Tionghoa	632.372
Batak	8.466.969
Minangkabau	6.462.713

Sumber: Badan Pusat Statistik Jumlah Suku di Indonesia, 2022 dalam Alifah (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 presentase komunitas Betawi di DKI Jakarta hingga saat ini hanya 2,8 % dari etnis pendatang. Artinya, jumlah komunitas Betawi tersingkir ke sekitar daerah DKI Jakarta. DKI Jakarta memiliki banyak potensi wisata budaya Betawi yang dapat dikembangkan. Salah satu cara untuk merevitalisasi wisata budaya di DKI Jakarta adalah dengan mengembangkan acara dan festival budaya yang menampilkan keanekaragaman kultur di Jakarta. Peran masyarakat setempat juga sangat penting dalam merevitalisasi wisata budaya di DKI Jakarta. Masyarakat dapat dilibatkan dalam pengembangan dan promosi pariwisata, dan mendapatkan manfaat yang adil dari industri pariwisata.

Kawasan Budaya Betawi Setu Babakan ini merupakan salah satu cagar budaya Betawi sebagai ciri khas dari DKI Jakarta. Kawasan ini sudah ada sejak tahun 2000, memiliki luas area sebesar 289 ha.

Kawasan budaya ini adalah bentuk pelestarian budaya Betawi.

**Gambar 1. 2 Perluasan Daerah Setu Babakan**



Sumber: (Cahyanti & Prayogi, 2023)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas bahwa perluasan daerah wisata budaya Setu babakan bertambah pada lokasi danau. Hal ini disebabkan oleh adanya program revitalisasi kawasan wisata. Berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Wilayah DKI Jakarta 2011- 2030, Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dalam pengembangannya dibentuk menjadi wilayah wisata budaya sekaligus wisata alam yang unggul dan berkesinambungan sehingga kegiatan yang ada dilaksanakan dengan tujuan untuk menaikkan daya tariknya. Ditinjau dari Perda Jakarta No. 3 tahun 2005 bahwasanya Setu Babakan telah dikukuhkan sebagai wilayah pelestarian budaya sekaligus wisata alami. Dasar hukum dalam pengelolaan kawasan ini seperti Surat

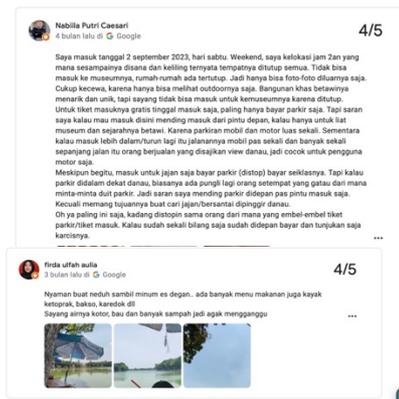
Keterangan Gubernur DKI Jakarta Nomor 92 tahun 2000, mengenai Penataan Lingkungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan yang ditetapkan sebagai Perkampungan khusus Budaya Betawi. Selain itu, dikuatkan dengan Peraturan Daerah mengenai cagar budaya yaitu, Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 01 tahun 2012 pasal 71 bahwa kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan merupakan Kawasan Khusus Warisan Budaya.

Revitalisasi wisata budaya adalah proses pemulihan dan pengembangan ulang destinasi wisata yang berfokus pada kekayaan budaya dan warisan tradisional suatu daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, apresiasi, dan pelestarian budaya, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi komunitas setempat. Berdasarkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Rehabilitasi Daerah. Regenerasi merupakan upaya peningkatan nilai suatu lahan/kawasan melalui pembangunan kembali suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Revitalisasi sendiri dapat dikatakan bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik tetapi harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi dan pengenalan budaya. Revitalisasi merupakan sebagai sebuah kegiatan kompleks. Kegiatan

restorasi cagar budaya tidak hanya bertujuan pada pergerakan fisik bangunan tetapi juga mencakup lanskap sebagai bagian integral dari bangunan, dengan tujuan tidak hanya untuk melindungi dan memelihara bangunan konservasinya tetapi terhadap mengembangkan dan memanfaatkannya. wisata.

Pada proses pengelolaan pihak Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan diperlukan evaluasi aspek pelayanan seperti, kebersihan, tata Kelola atau penataan, sarana dan prasarana yang masih belum terawat dengan baik (Mulyadi & Tuzzahara Alkaf, 2020). Pelestarian budaya Betawi sampai saat ini kian menurun. Kondisi modernisasi mempengaruhi tingkat kelestarian budaya Betawi. Wisata budaya Betawi di DKI Jakarta dilestarikan melalui wisata alam dan komunitas Betawi. Hal ini menghadirkan konsep perubahan melalui revitalisasi, namun kenyataannya kawasan yang dilakukan revitalisasi tidak sepenuhnya mengenai budaya Betawi, melainkan percampuran dan dominan ke budaya-lain. Sehingga keasrian budaya Betawi tidak terlihat bahkan tetap menurun.

### **Gambar 1. 3 Google Review**



Sumber: Dokumentasi pribadi, 2023

Berdasarkan hasil penilaian pada gambar 1.3 diatas bahwa masih terdapat kekurangan pada segi pelayanan dan kelengkapan sarana prasarana. Pelayanan kepada pengunjung masih hanya pada sarana museum dan area budaya. Kegiatan pungutan liar masih banyak terjadi di area kawasan wisata, kebijakan pihak UPK yang membebaskan dan tidak memberikan ketegasan memberikan kemudahan masyarakat setempat mengambil keuntungan. Selain itu, pelayanan kebersihan pada lingkungan sekitar terutama masalah sampah masih sangat kurang. Unit Pengelola Kawasan dalam menanggapi masukan memberikan forum evaluasi setiap tahunnya dengan pelaksanaan kebijakan revitalisasi rutin.

Oleh karena itu, penelitian mengenai kebijakan revitalisasi tempat wisata perlu dilakukan pengawasan dan tepat sasaran dengan melihat sisi evaluasi. Penelitian ini dimaksudkan menilai atau evaluasi hasil program revitalisasi terhadap

kualitas pelayanan Perkampungan Budaya Betawi Setu babakan. Efektifitas dan dampak yang signifikan akan adanya kebijakan revitalisasi dalam mereduksi penyimpangan dan mengembangkan wisata budaya di perkotaan. Sehingga dapat menghasilkan pemahaman dan pandangan mengenai kebijakan revitalisasi dan pengembangan wisata budaya secara nyata melestarikan warisan budaya tanah air terutama budaya Betawi asli DKI Jakarta. Atas uraian diatas, tersebut yang melatarbelakangi penulis melangsungkan penelitian dengan sumber pertanyaan yaitu *“Bagaimana evaluasi atau penilaian terkait kebijakan revitalisasi rutin yang dilakukan pihak pengelola mampu mengembangkan wisata budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan?”*

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil evaluasi program kebijakan revitalisasi wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan?
2. Apa saja faktor penghambat program kebijakan revitalisasi dalam wisata budaya Setu Babakan terhadap pelestarian identitas budaya Betawi di DKI Jakarta?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan revitalisasi

wisata budaya Setu Babakan di Jakarta Selatan dengan teori W. Dunn dan konsep revitalisasi.

2. Untuk menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi program revitalisasi wisata budaya Setu Babakan dalam pelestarian budaya Betawi di DKI Jakarta.

## **D. Kerangka Teori**

### **Administrasi Publik**

David H. Rosenbloom Pasolong (2011:13) mengartikan administrasi publik sebagai pemenuhan dari kebutuhan pemerintah bidang legislatif dalam melakukan manfaat teori – teori dan proses manajemen, politik dan hukum sebagai fungsi pemenuhan pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, bahwasanya administrasi publik adalah suatu kerjasama dua orang atau lebih dalam usaha – usaha pelaksanaan kebijakan pemerintah seperti formulasi, implementasi dan mengelola (*manage*) keputusan – keputusan yang telah ditetapkan oleh badan – badan perwakilan politik atau legislatif untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan administrasi publik sendiri meliputi implementasi kebijakan, koordinasi kebijakan, dan juga kegiatan

kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan Ilmu administrasi publik sendiri sangat erat hubungannya dengan ilmu politik.

### **Paradigma Administrasi Publik**

Adapun pada penelitian ini menggunakan paradigma administrasi publik yang ke-6 yaitu paradigma *governance* yang merupakan suatu pembaharuan dari paradigma sebelumnya. Dalam paradigma ini Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara bertahap akan mengubah sistem manajemen negara yang pada awalnya bersifat tertutup, tidak akuntabel menjadi sistem manajemen negara yang bersifat terbuka (transparan) dan akuntabel. Hal ini berkaitan dengan adanya upaya dari pemerintah untuk melakukan pengembangan pelayanan publik dalam bidang wisata terutama untuk masyarakat kota. Hal ini sekaligus upaya pelestarian budaya asli daerah suatu tempat.

### **Administrasi Publik Baru atau Governance (1997)**

Paradigma ini merupakan paradigma terbaru berdasarkan proses perkembangan ilmu administrasi publik yang tersusun atas serangkaian yang telah ditemukan. Dengan adanya pergantian dari *government* ke arah *governance* yang

merincikan perihal perpaduan di dalam stabilitas pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), sehingga arah perkembangan paradigma ini menuju pada pemerintahan yang baik (*good governance*).

### **Kebijakan Publik**

Woll yang dikutip Tangkilisan (2003:2), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah kegiatan pemerintah yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk memahami posisi dan peran strategis pemerintah sebagai aktor publik, dalam kaitannya dengan kebijakan publik, perlu dipahami bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

### **Evaluasi Kebijakan**

**William N. Dunn**, memberikan pengertian istilah evaluasi sebagai berikut: “Secara umum istilah evaluasi dapat diumpamakan dengan mengevaluasi, memberi peringkat, dan mengevaluasi, yaitu kata yang mewakili suatu upaya untuk menganalisis hasil-hasil kebijakan dalam satuan nilai. Menurut William Dunn terdapat kriteria melakukan evaluasi

kebijakan adalah **efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan**. Evaluasi kebijakan dianggap sebagai kegiatan yang fungsional. Tujuan melakukan evaluasi adalah untuk membantu memahami tujuan kebijakan, cara penerapannya, dan jenis dampak yang dicapai. Evaluasi dapat memberikan informasi yang baik dan dapat diandalkan dalam pelaksanaan kebijakan berikutnya, khususnya sejauh mana kebutuhan, nilai, peluang dan tujuan dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini penilaian menunjukkan sejauh mana tercapainya tujuan dan sasaran tertentu dalam penyelesaian masalah.

### **Kebijakan Revitalisasi**

Revitalisasi secara harfiah berarti arti yang mencipta kembali atau menghidupkan kembali apa yang telah ada sebelumnya, namun juga menyempurnakan struktur, mekanisme pengoperasian, dan adaptasinya dengan kondisi yang baru. Berdasarkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Rehabilitasi Daerah. Regenerasi merupakan upaya peningkatan nilai suatu lahan/kawasan melalui pembangunan kembali suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Revitalisasi sendiri dapat dikatakan bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik tetapi harus

dilengkapi dengan peningkatan ekonomi dan pengenalan budaya. Revitalisasi merupakan sebagai sebuah kegiatan kompleks.

### 1. Intervensi Fisik

Citra sebuah kawasan berkaitan dengan visual atau kondisi fisik dalam menarik pengunjung atau wisatawan, maka analisis ini sangat diperlukan.

### 2. Rehabilitasi Ekonomi

Perbaikan fisik akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi secara formal maupun informal sehingga memberikan nilai tambah pada kawasan tersebut.

### 3. Revitalisasi Sosial

Kegiatan revitalisasi akan berhasil apabila menciptakan suasana baru dan menarik, jadi tidak hanya membuat cantik tetapi berdampak positif pada kehidupan sosial masyarakat sekitar.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2009) juga menerangkan bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan secara natural dengan kondisi yang alamiah untuk memperoleh hasil

senatural mungkin, menggunakan sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Beberapa narasumber telah dipilih oleh penulis untuk menjadi informan penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Efektivitas

Berdasarkan kriteria efektifitas terdapat tiga indikator yang dapat diuji dalam kebijakan revitalisasi ulang Perkampungan Budaya Setu Babakan. Indikator tersebut adalah efektif dalam menyediakan sumber tenaga kerja, efektif dalam peningkatan kunjungan dan efektif pengembangan budaya Betawi.

#### 1) Pemaknaan Peran Unit Pengelola Kawasan Setu Babakan terhadap Pencapaian Target Kebijakan Revitalisasi

Pada pemaknaan peran *stakeholders* yang menjalankan kebijakan, sesuai dengan indikator efektifitas yaitu menjawab pertanyaan “apakah hasil yang

diingin telah dicapai?”. Kebijakan revitalisasi memang sangat mendukung untuk pembaharuan dan perbaikan secara berkala dan rutin di sekitar kawasan. Aspek tata ruang dan pengelolaan yang masih perlu di benahi menjadi harapan bagi pengelola, pedagang dan pengunjung atau masyarakat sekitar. Hal ini juga di ungkapkan oleh Ibu Farah Aini selaku Kepala Satuan Pelaksana Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, beliau menyatakan bahwa:

“...Manfaat kebijakan revitalisasi rutin yang ada di kampung ini bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar, belum semua tetapi dapat kita tampung. Edukasi buat masyarakat mengenai usaha dan pelestarian Budaya Betawi. Binaan Unit Pengelola Kawasan dari UMKM ada 30 di sekitar kawasan. Perkembangan sarana dan prasarana terus maju, jadi menitikberatkan pada perubahan yang secara nyata dapat terlihat...”

(Hasil wawancara pada tanggal 23 Oktober 2023)

**Tabel 1.4 Pencapaian Kerja UPK PBB Setu Babakan 2023**

Bidang/UKPD	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Jumlah Pelaku dan Unsur Seni
UPK PBB Setu Babakan	Juli 2023	1. Kunjungan Yayasan Pesantku 2. Wajib Kunjung Sudin JakBar 3. TK Rahnul Jihad 4. SMPN 253 Jakarta	820 / 9
UPK PBB Setu Babakan	Agustus 2023	1. Senam massal 2. SDN 03 dan 06 Jagakarsa 3. SMAN 86 dan 87 Jakarta 4. SMP Darul ILMU 5. Universitas Global Jakarta	1.011 / 27
UPK PBB Setu Babakan	September 2023	1. TK Mini Pak Kaaur 2. RA Quratul Ain 3. School Of Language 4. SMAN 70 Jakarta 5. Athaqawa Boarding school 6. Nikah Massal 7. FIB UGM	1535 / 44
UPK PBB Setu Babakan	Oktober 2023	1. SMPK Penabur 2. SDN 02 Cipayung 3. Global Islamic School Condet 4. UPN Jakarta	996 / 34

Sumber: Data diolah pribadi, 2023

Target Unit Pengelola Kawasan Setu Babakan mencakup penyebaran jumlah pedagang dan peningkatan jumlah penduduk dikatakan stabil dan terus meningkat. Keluaran dari kebijakan yang dilaksanakan berupa benda atau yang dikerjakan seperti program budaya dan pelatihan pedagang secara efektif meningkatkan jumlah pengunjung Setu Babakan. Kegiatan tersebut dapat diukur dengan standar yang jelas, yang dapat memberikan kita gambaran mengenai hasil atau dampak dari kebijakan publik. Kondisi lapangan saat melakukan observasi sudah cukup baik, dikarenakan beberapa perencanaan fasilitas yang tercantum dalam rencana revitalisasi rutin sudah mulai berjalan. Namun, pengembangan dan kelancaran kebijakan masih dikaji oleh pihak UPK dan Dinas Kebudayaan pada kebijakan revitalisasi tahun mendatang melalui masterplan. Menurut William Dunn, kebijakan publik akibat yang secara tidak langsung, yaitu pengalaman suatu organisasi atau beberapa yang terlibat. Misalnya, biaya tidak diperhitungkan dalam proses pengambilan kebijakan.

## 2) Peran Pihak Eksternal dalam Pelaksanaan Kebijakan Revitalisasi Rutin Kawasan Setu Babakan

Kebijakan ini dilaksanakan dengan kolaborasi bersama Unit Pengelola Badan Air dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta. Kerjasama pada kawasan Setu Babakan di pimpin oleh pihak UPK menjalankan revitalisasi pada kawasan budaya, danau/air dan area sekitar untuk perekonomian setempat. Pengawasan pada pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui rapat rutin pada setiap bidang revitalisasi setiap stakeholders. Kebijakan revitalisasi dilakukan secara rutin setiap tahunnya dengan dilakukan rapat evaluasi antara stakeholders terkait.

**Gambar 1.4 Proses Pembangunan *Living Museum* Ismail Marzuki**



Sumber: Diolah pribadi, 2023

Konsep pembangunan ini dilakukan berdasarkan hasil masterplan revitalisasi tahun 2021 yang disahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2015 tentang pelestarian Budaya Betawi. Namun, area kawasan Setu Babakan dikelilingi oleh pemukiman masyarakat, sehingga akses kawasan sering dijadikan jalan pintas. Pembangunan *living museum* ini sempat tidak berjalan akibat

terjadi kesalahpahaman antara pihak UPK dengan Masyarakat yang sering mobilitas di area pembangunan. Oleh karena itu pihak UPK PBB dan UPK Badan Air menyegerakan pembangunan di tahun 2024.

## **B. Analisis Efisiensi**

Efisiensi akan tercapai melalui pemanfaatan sumber daya dimanfaatkan secara optimal pada indikator pertama. Menurut Dunn, efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Tingkat rasionalitas ekonomi ini menjadi tolak ukur kebijakan dikatakan berhasil apabila dapat mempengaruhi seluruh kinerja yang di laksanakan. Efisiensi dalam kebijakan revitalisasi ini dapat dijelaskan melalui efisiensi waktu, efisiensi pembiayaan, dan efisiensi sumber daya. Efisiensi ditentukan dengan perhitungan per unit produk atau jasa.

### **1) Analisis Efisiensi Hasil Kebijakan Revitalisasi Rutin PBB Setu Babakan melalui Cost-Effectiveness Analysis (CEA) terhadap Infrastruktur**

Dari hasil penelitian efisiensi nilai biaya yang dilaksanakan pihak pengelola diatas, bahwa tingkat hasil *outcome* yang dihasilkan belum sepenuhnya seimbang dengan pembiayannya. Tingkat gap yang cukup jauh dengan keadaan nyata sarana prasarana yang cukup lambat berkembang.

Hal ini dijelaskan oleh Ibu Farah Aini selaku Kepala Satuan Pelaksana Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, beliau menyatakan bahwa:

“...Setiap tahun melaksanakan revitalisasi, melalui evaluasi, analisis dan dilihat potensi yang perlu ditingkatkan. Setiap tahun melalui anggaran Suku Dinas dan Pemerintah Daerah. Namun memang, kita kewalahan dalam pelaksanaannya sehingga realisasinya masih kurang. Dengan pegawai yang masih sedikit dan tingkat gap kawasan yang luas tidak seimbang. Ya, jadinya inovasi yang dirancang di kebijakan dipilih yang paling sesuai dulu, walaupun anggaran yang didapat sesuai dengan masteplannya...”

(Hasil wawancara pada tanggal Senin, 23 Oktober 2023)

Berdasarkan jawaban informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi biaya sesuai dengan CEA tidak cukup baik berpengaruh pada *outcome* atau hasil yang diinginkan. Hal ini cukup berpengaruh pada penilaian kinerja dan hasil revitalisasi rutin yang dilakukan pihak pengelola kawasan. Tingkat efektifitas hanya terlihat secara optimal melalui program inovasi kebijakan utama. Namun, pembenahan sarana dan prasarana masih belum memenuhi syarat baik. Tingkat gap yang terjadi antara *outcome* dan pembiayaan dapat disimpulkan bahwa efektifitas biaya terhadap hasil tidak selaras dengan baik.

## 2) Stabilitas Pengembangan Hasil Revitalisasi PBB Setu Babakan melalui Efisiensi Operasional

Indikator efisiensi operasional merupakan konsep yang mencerminkan kemampuan organisasi atau unit tersebut untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan operasionalnya dengan cara optimal. Sehingga, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan informan terkait melihat efisiensi yang berfokus pada persediaan sumber daya. Pelaksanaan kebijakan revitalisasi yang dilakukan UPK PBB Setu Babakan dilandaskan pada sumberdaya. Namun, sumber daya tenaga kerja pada pelaksanaan operasional setelah melakukan revitalisasi dinilai tidak sesuai dan tidak relevan dengan kebutuhan tenaga kerja seharusnya. Berikut penjelasan yang diberikan oleh Ibu Farah Aini selaku Ketua Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Setu babakan yaitu :

“...Tentu terdapat ketidakefesiensian biasanya pihak pengelola yang memiliki jumlah 141, sedangkan kawasan yang luas ini 287 hektar harus di Kelola, sangat tidak relevan dan tidak efisien dalam pengerjaannya. Sehingga kita selalu melakukan analisis penyebaran kebutuhan tenaga kerja, dilihat setiap beberapa meter persegi harusnya ada berapa orang. Dan terdapat kecenderungan lambatnya perubahan setelah revitalisasi dikarenakan ini....”

(Hasil wawancara pada tanggal Senin, 23 Oktober 2023)

Kondisi wilayah Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dengan tenaga kerja yang mengelola dirasa tidak efisien. Sedangkan penerapan efisiensi operasional di dasarkan pada kemampuan sumber daya untuk merubah. Selain itu sumber daya teknologi yang digunakan sebagai hasil revitalisasi tidak berjalan dengan baik. Tidak sedikit penggunaan fasilitas yang tidak sesuai dengan fungsinya dan bahkan tidak digunakan sehingga semakin rusak.

**Gambar 1.5 Fasilitas Rusak**



*Sumber: Dokumentasi pribadi, 2023*

Berdasarkan gambar 1.5 tersebut bahwa perawatan fasilitas yang ada di kawasan masih belum optimal. Tanda pengumuman yang sudah tidak terlihat dapat menyebabkan pengunjung kesulitan melihat informasi. Tempat sampah yang tidak terawat dan sudah rusak, sehingga disekeliling kawasan masih terdapat sampah yang berserakan. Selain itu, penanda untuk masuk ke area air tidak terdapat penanda. Hal ini dikarenakan

kekurangan jumlah sumberdaya tenaga kerja yang tidak efisien, sehingga proses perawatan setelah dilakukan revitalisasi tidak berjalan optimal.

### **C. Analisis Kecukupan**

Kecukupan dapat diukur melalui indikator sebelumnya yaitu efisiensi dan efektif. Penggunaan indikator ini didasarkan pada komponen yang diuji yaitu, pencapaian tujuan, penggunaan sumber daya, dukungan masyarakat, partisipasi stakeholder, ketersediaan dan akses sumber daya, efektivitas instrument kebijakan, responsive terhadap perubahan, kesesuaian dengan konteks sosial dan budaya, keberlanjutan, akuntabilitas, pemantauan dan evaluasi internal, pemberdayaan masyarakat, dampak sosial dan ekonomi, distribusi manfaat, dan perubahan perilaku.

#### **1) Analisis Partisipasi Stakeholders dalam Pelaksanaan Kebijakan Revitalisasi Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan**

Pengukuran kebutuhan dan kecukupan dalam pembagian tugas masih tidak jelas tupoksinya. Beberapa stakeholders masih bergantung dengan keputusan dan alur pelaksanaan formal. Kebijakan revitalisasi yang dilakukan secara rutin hanya berfokus pada masterplan yang dirancang dan dilakukan oleh satu stakeholders. Sehingga keberlangsungan proses pengoptimalan kebijakan hanya dilakukan pada pihak

tertentu. Kecukupan ini dapat dilihat dengan jumlah pengunjung yang hingga saat ini terus mengalami penurunan. Berikut adalah data pengunjung Kawasan Wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan sebagai berikut:

**Gambar 1.6 Grafik Data Pengunjung UPK PBB Setu Babakan 2023**



*Sumber: data olahan pribadi, 2023*

Koordinasi dan kerjasama mulai dibenahi dengan adanya *quality control* setiap pihak sesuai dengan tugasnya. Hal ini dikarenakan kurang transparasinya proses pelaksanaan kebijakan revitalisasi. Menurut Dunn, dengan partisipasi stakeholder, evaluasi kebijakan dapat memanfaatkan informasi yang kaya dan mendalam, sehingga ini akan membantu dalam analisis yang lebih komprehensif. Stakeholder membantu memastikan bahwa kriteria kecukupan yang digunakan dalam evaluasi mencerminkan kebutuhan aktual dan relevan mereka. Ini mendukung kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks. Selama ini pihak UPK hanya melakukan pembenahan di Zona A M.H Thamrin melalui pembangunan

museum, theater, dan taman. Namun, koordinasi pembenahan dengan pihak UPK Badan Air masih sulit dilakukan

## 2) Kecukupan terhadap Pencapaian Hasil Revitalisasi dalam bidang Infrastruktur dan Biaya

Dalam sebuah kawasan wisata sarana dan prasarana memiliki posisi yang sangat penting untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Sarana berkaitan dengan segala fasilitas yang memiliki kegunaan untuk memberikan kemudahan bagi para pengunjung. Sementara prasarana berkaitan dengan fasilitas yang baik berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia yang diperlukan dalam perjalanan wisata.

### 1. Pintu Masuk

Kondisi pintu masuk juga terdapat loket retribusi untuk parkir yang akan dikenakan tarif Rp.3.000,- rupiah. Selain itu akses pintu dibuka bebas dan tidak memiliki jam operasional yang pasti.

### 2. Gedung Museum dan Amphitheater

Terletak di area kawasan perkampungan budaya Betawi yang terhubung dengan gedung unit pengelola. Museum ini dibuka untuk umum bagi para pengunjung yang ingin melihat sejarah, pekermbangan dan kebudayaan seni

Betawi. Sedangkan theater digunakan untuk acara pertunjukan yang diadakan setiap minggunya dengan menampilkan kebudayaan Betawi.

### 3. Tempat Parkir dan Loket

Kondisi parkir hanya terdapat di dalam kawasan budaya dan sekitar area danau. Luas tempat parkir yang tersedia sangat minim untuk roda empat. Sehingga masih sangat kurang untuk fasilitas parkir seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rayhan Noviandry selaku pengunjung kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan yaitu:

“...parkir diarea sini masih cukup susah, apalagi di sekitar danau ini jadi harus parkir pinggi jalan. Selain itu kalau bawa mobil dan papasan dengan lawan arah jalannya cukup sempit.”

(Hasil wawancara pada tanggal Jumat, 27 Oktober 2023)

4. Living Museum
5. Danau
6. Petunjuk Jalan

## D. Analisis Perataan

Pemerataan (*equity*) berkaitan dengan distribusi keuntungan dan beban kebijakan secara adil diantara berbagai kelompok dan individu. Pemerataan hasil kebijakan revitalisasi di kawasan Setu Babakan peneliti mencoba menganalisa bagaimana kegiatan revitalisasi kawasan

Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan

## 1) Analisis Distribusi Manfaat Revitalisasi

Hasil revitalisasi memberikan peluang wisata yang besar bagi kawasan Setu Babakan mulai dari adanya fasilitas museum hingga teater. Selain itu pelayanan publik mengenai budaya Betawi dapat menarik wisatawan lokal dan internasional, menciptakan peluang ekonomi baru. Kawasan Setu Babakan dijadikan pariwisata sekaligus cagar budaya Betawi di Jakarta. Berikut hasil pengembangan pariwisata melalui pelebaran jangkauan wisatawan seperti melakukan berbagai kolaborasi atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Setu Babakan:

### Gambar 3. 15 Workshop Kegiatan



Sumber: Dokumentasi pribadi, 2023.

Salah satu kegiatan besar yang merupakan hasil revitalisasi adalah kegiatan Kurasari Sanggar Seni dan Kuliner Betawi, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan pemerataan hasil revitalisasi yang dapat dilihat masyarakat luas. Selain itu,

pengenalan budaya kepada masyarakat lokal maupun wisatawan lainnya. Hal ini dikarenakan pemanfaatan melalui media sosial sebagai wadah informasi keberlangsungan kegiatan operasional yang dilakukan Unit Pengelola Kawasan Setu Babakan. Kegiatan yang dilakukan pihak pengelola merupakan pengembangan inovasi hasil revitaliasi yaitu mengikuti arus perkembangan zaman. Pihak Unit Pengelola berpendapat bahwa adanya media sosial lebih memudahkan dalam memberikan informasi ke masyarakat terutama implementasi program yang dapat diikuti secara umum.

## 2) **Perataan dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar**

Pihak UPK PBB dalam pelaksanaannya memberikan inovasi terhadap pedagang sekitar Pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan kepada para pedagang dan UMKM sekitar kawasan. Hal ini dijelaskan oleh salah satu informan yaitu Ibu Farah Aini selaku Ketua Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Setu Babakan yaitu:

“Edukasi buat masyarakat mengenai usaha dan pelestarian Budaya Betawi. Binaan dari UPK dari UMKM ada 30 termasuk pedagang yang terdaftar. Kami melakukan sosialisasi dan webinar untuk kemajuan penjualan. Dan kita ga memaksa bidang apa yang dijual tapi berfokus ke budaya Betawi.”

(Hasil wawancara pada tanggal Senin, 23 Oktober 2023)

Evaluasi kebijakan dapat menilai sejauh mana kebijakan ini memberdayakan pedagang dan UMKM di sekitar kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Jika pertemuan dan inovasi yang diadakan memberikan kesempatan yang setara kepada semua pedagang dan UMKM, ini dapat dianggap sebagai indikator kesetaraan akses.

Pihak UPK melakukan kerjasama dengan pihak swasta, universitas, sekolah maupun lembaga lainnya dalam pengadaan pemberdayaan. Upaya Pihak UPK PBB untuk mengadakan pertemuan dengan para pedagang mencerminkan langkah-langkah partisipatif yang dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan. Pihak Unit Pengelola Kawasan Setu Babakan sedang menggalakan identitas budaya Betawi melalui kuliner. Perataan kuliner Betawi yang menjadi ciri khas kawasan wisata seperti kerak telur, dodol Betawi, gado-gado dan Soto Betawi menjadi fokus utama. Berdasarkan hasil observasi peneliti secara langsung, produk jualan yang di tawarkan masih belum sepenuhnya ciri khas kuliner Betawi. Selain itu, pihak Unit Pengelola Kawasan Setu Babakan masih mengkaji tata kelola

mengenai penataan pedagang maupun kondisi jalan sekitar danau. Perhatian khusus yang dilakukan oleh pihak pengelola meliputi forum rutin yang diadakan setiap minggu di gedung Amphitheater, kegiatan ini ditujukan kepada pedagang dan umkm untuk menyampaikan aspirasinya.

### **E. Analisis Responsivitas**

Responsivitas merujuk pada kemampuan kebijakan atau program untuk merespon kebutuhan, aspirasi dan dinamika yang ada dalam masyarakat atau lingkungan kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Indikator responsivitas melibatkan pemahaman mendalam tentang apakah program kebijakan benar-benar memenuhi kebutuhan yang ada di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat sejauh mana program revitalisasi melibatkan dan merespons masukan dari pemangku kepentingan lokal, termasuk masyarakat setempat, pedagang dan kelompok-kelompok budaya. Program revitalisasi harus responsif terhadap perubahan kondisi dan dinamika lingkungan sekitar. Responsivitas mencakup keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan.

#### **1) Adaptabilitas Unit Pengelola Kawasan Setu Babakan terhadap Perubahan Kondisi atau Kebutuhan**

Kebijakan harus dapat beradaptasi dengan keadaan atau target tujuan kebijakan itu sendiri. Proses pemantauan yang efektif akan memungkinkan UPK untuk merespons secara cepat terhadap perubahan. UPK PBB saat ini melakukan *monitoring* dan pemantauan terhadap mekanisme pengelolaan operasional kegiatan di kawasan wisata. Siklus perkembangan ini diiringi dengan perubahan budaya Betawi secara terus menerus. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Jaka selaku Ketua Pengelola Museum dan Sejarah Betawi Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan yaitu:

“...Pembangunan Museum Betawi diiringi dengan keberjalanan pembangunan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Betawi memiliki siklus atau proses yang dikenal dengan Siklus Budaya Betawi melalui 7 unsur budaya Betawi. Museum Betawi ini memakai 2 konsep yaitu 10 siklus atau fase kehidupan masyarakat Betawi dan 7 unsur budaya. Adaptasi diperlukan baik untuk keberlangsungan budaya maupun pembangunan kawasan wisata ini.”

(Hasil wawancara pada tanggal Senin, 23 Oktober 2023)

Oleh karena itu pihak UPK PBB memberikan inovasi lebih dengan melakukan tata pameran museum sesuai dengan standar. Keterlibatan ahli museum dalam merencanakan tata pameran menunjukkan responsivitas terhadap kebutuhan profesional dan spesifik dalam

bidang tersebut. Selain itu pihak UPK PBB menyesuaikan konten museum mencerminkan usaha untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan.

## 2) **Fleksibilitas Kebijakan Revitalisasi Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan**

Kebijakan dapat mencakup fleksibilitas untuk menyesuaikan program pendidikan budaya yang diselenggarakan di Setu Babakan. Pihak UPK PBB menyediakan program untuk edukasi secara umum maupun khusus. Setiap sekolah yang ingin berkunjung akan mendapatkan edukasi budaya Betawi mulai dari sejarah, kuliner, adat, pakaian, seni tari, dan seni musik. Tindakan pengelolaan lingkungan seperti pembersihan danau, pengelolaan limbah, dan pelestarian flora dan fauna di sekitar Setu Babakan mungkin telah dilakukan untuk menjaga keindahan dan keberlanjutan lingkungan.

### **F. Analisis Ketepatan**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti secara langsung indikator ketepatan pada kebijakan revitalisasi yang dilaksanakan UPK PBB Setu Babakan belum optimal. Ketepatan merupakan rangkuman dari indikator-indikator sebelumnya yang dapat dijadikan simpulan evaluasi sebuah kebijakan,

termasuk kebijakan revitalisasi yang dilakukan UPK PBB. Berikut hasil analisis observasi yang dilakukan peneliti dalam meninjau indikator ketepatan pada kebijakan revitalisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan:

1. Ketepatan dalam Pencapaian Tujuan Revitalisasi, Berdasarkan penjelasan Ibu Farah Aini selaku Ketua Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Setu Babakan yaitu:

“...Setiap tahun melaksanakan revitalisasi, melalui evaluasi, analisis dan dilihat potensi yang perlu ditingkatkan. Setiap tahun melalui anggaran Suku Dinas dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya kampung ini bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar, belum semua tetapi dapat kita tampung. Sejauh ini berdasarkan hasil evaluasi setiap tahun, mampu sesuai dengan tujuan kebijakan revitalisasi rutin mba.”

(Hasil wawancara pada tanggal Senin, 23 Oktober 2023)

Berdasarkan jawaban dari informan diatas bahwa, tujuan adanya kebijakan revitalisasi adalah untuk peningkatan kelestarian budaya Betawi dan perekonomian sekitar. Dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban informan diatas belum dapat dikatakan valid, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan

pemangku kepentingan dan target sasaran kebijakan itu sendiri.

2. Ketepatan Penggunaan Sumber Daya Manusia, Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya menjadi indikator penting keberhasilan sebuah kebijakan. Penerapan sistem operasional dapat mempengaruhi keberlangsungan kebijakan dan perataan setiap sektor yang berjalan. Unit Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan sendiri memiliki jumlah pegawai 141 dengan luas kawasan sekitar 287 hektar. Sehingga, jumlah kawasan dengan kesediaan sumber tenaga yang tidak relavan. Menurut beberapa informan lain bahwa, pengawasan terhadap keberlangsungan pengelolaan sangat minim. Sumber daya yang terlibat di Unit Pengelola Kawasan sebagian adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja hanya dalam hal administrasi.
3. Ketepatan Dampak Sosial Positif dan Kelestarian Budaya Betawi, Evaluasi terhadap dampak sosial positif revitalisasi, termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perubahan positif dalam struktur sosial. Kebijakan revitalisasi yang dilakukan pihak UPK bertujuan secara tidak langsung dalam keberlangsungan budaya Betawi dan masyarakat asli

setempat. Dampak ini dapat meliputi sejumlah faktor, termasuk perubahan dalam gaya hidup, perasaan keamanan, dan interaksi sosial. Selain itu, peningkatan hubungan struktur sosial antar warga dan pihak pengelola terus dikembangkan melalui forum. Unit Pengelola Kawasan juga melakukan kolaborasi dengan organisasi Betawi dalam mengelola website atau laman internet Setu Babakan yaitu [setubabakan.com](http://setubabakan.com).

### Gambar 1.7 Website Resmi



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023

Berdasarkan gambar diatas bahwa bukti kerjasama yang dilakukan oleh pihak pengelola dengan organisasi Betawi cukup baik. Dalam website tersebut dijelaskan sejarah, jenis budaya hingga informasi kegiatan yang dilakukan di kawasan.

## G. Analisis Hambatan Kegiatan Revitalisasi Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan di Jakarta Selatan

### 1. Komunikasi

Dari pihak Unit Pengelola Kawasan sendiri terdapat permasalahan mengenai alur operasional pengelolaan kawasan. Dimana, jumlah pegawai dengan luas kawasan yang tidak sebanding. Sehingga sering terjadi tumpang tindih pekerjaan. Akibatnya, terjadi ketidakselarasan hasil kegiatan yang dikerjakan. Koordinasi yang dilakukan pihak pengelola hanya berfokus pada satu pintu saja. Pelayanan kepada pengunjung masih hanya pada sarana museum dan area budaya. Selain itu, pelayanan kebersihan pada lingkungan sekitar terutama masalah sampah masih sangat kurang.

## **2. Sumber Daya**

Pelayanan kepada pengunjung masih hanya pada sarana museum dan area budaya. Kegiatan pungutan liar masih banyak terjadi di area kawasan wisata, kebijakan pihak UPK yang membebaskan dan tidak memberikan ketegasan memberikan kemudahan masyarakat setempat mengambil keuntungan. Selain itu, pelayanan kebersihan pada lingkungan sekitar terutama masalah sampah masih sangat kurang. Pengadaan lahan yang dilakukan UPK PBB Setu Babakan menjadi salah satu penghambat kegiatan revitalisasi. Hal ini dikarenakan hak kepemilikan lahan kawasan wisata terbagi menjadi dua, yaitu milik pemerintah daerah dan milik pribadi atau masyarakat.

## **3. Partisipasi Masyarakat**

Perkembangan partisipasi masyarakat dalam pemberian aspirasi menurut pihak pengelola dapat melalui media massa. Unit Pengelola Kawasan Setu Babakan memberikan akses bebas kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap hasil revitalisasi maupun layanan yang diberikan. Namun, pihak UPK PBB Setu Babakan sendiri memang belum secara luas, memberikan informasi. Hal ini masih dikaji dalam rencana masterplan di kebijakan revitalisasi selanjutnya. Akan tetapi, partisipasi pihak lain seperti organisasi Betawi lainnya sudah cukup baik. Mulai dari kerjasama dalam pembuatan *website*, pagelaran seni yang bekerja sama dengan organisasi pecak silat serta kerjasama dengan forum Betawi sekeliling kawasan.

## **4. Struktur Birokrasi**

Unit Pengelola Kawasan Setu Babakan merupakan satuan unit yang secara khusus mengelola kawasan. Akan tetapi, UPK PBB berada di naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Saat ini struktur birokrasi tetap sama namun, terdapat pergantian jabatan ketua pengelola yaitu Ibu Hj. Rofiqoh Mustofa. Proses pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada struktur birokrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Proses

pelaksanaan kegiatan di UPK PBB juga terdapat beberapa kebijakan yang disahkan. Seperti kebijakan jam operasional kawasan wisata, kebijakan kegiatan rutin, kebijakan Lebaran Betawi, kebijakan Pembersihan Area Kawasan dan pembebasan kegiatan wisata. Namun, struktur birokrasi yang ada tidak melibatkan lembaga atau organisasi diluar UPK sendiri. Pihak UPK hanya melakukan koordinasi dan kerjasama dalam program-program tertentu.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis evaluasi dan observasi menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam pengembangan pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Hasil revitalisasi di uji berdasarkan teori evaluasi kebijakan oleh William Dunn. Teori ini menggunakan enam indikator untuk melihat hasil suatu kebijakan yaitu:

### 1. Efektivitas

Pada tingkat efektivita keberhasilan kebijakan revitalisasi Kawasan Setu Babakan berdasarkan analisis adalah “Baik”. Hal ini dikarenakan perubahan secara signifikan pada infrastruktur dan prasarana. Selain itu, dampak terhadap kegiatan perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini juga diimbangi dengan

jumlah pengunjung yang terus bertambah.

### 2. Efisiensi

Pada tingkat efisiensi bergantung pada hasil tingkat efektivitas yang telah dinilai. Bahwa tingkat efisiensi pelaksanaan kebijakan revitalisasi sudah “Kurang Baik”. Hal ini dikarenakan hasil revitalisasi belum di maksimalkan dan masih terdapat keterlambatan pembangunan revitalisasi.

### 3. Kecukupan

Pada tingkat kecukupan keberhasilan kebijakan revitalisasi berdasarkan analisis “Kurang Baik” dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat maupun kuantitas sarana prasarana.

### 4. Perataan

Pada tingkat perataan keberhasilan kebijakan revitalisasi dinilai belum maksimal atau “Kurang Baik”. Hal ini dikarenakan perataan dalam pengadaan pemberdayaan kepada pedagang dan masyarakat, sarana serta prasarana dan informasi tidak masimal.

### 5. Responsivitas

Pada tingkat responsivitas keberhasilan kebijakan revitalisasi berdasarkan hasil analisis adalah “Baik”. Hal ini dikarenakan inovasi kegiatan revitalisasi dengan menyediakan wadah partisipasi masyarakat dalam penilaiannya setelah berkunjung ke kawasan Setu Babakan. Responsif terhadap perubahan teknologi dengan menyediakan edukasi budaya Betawi.

#### 6. Ketepatan

Pada tingkat ketepatan yang merupakan akhir dalam penilaian evaluasi kebijakan, kebijakan revitalisasi berdasarkan hasil analisis “Baik”. Perubahan perkembangan sarana dan prasarana mulai dari, teater, museum hingga kawasan wisata air. Namun, ketepatan pada setiap inovasi seperti *living museum* belum maksimal. Akibatnya, keterlambatan dalam proses pembangunan dan pemangkasan anggaran yang cukup besar.

Hambatan dalam proses kegiatan revitalisasi menjadi isu yang perlu dikaji dan diperbaiki dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi selanjutnya, diantaranya adalah komunikasi dan koordinasi serta kolaborasi yang perlu dilakukan pihak UPK dengan masyarakat maupun lembaga kebudayaan. Selain itu,

kekurangan sumber daya manusia dan anggaran dalam mengelola kawasan.

### SARAN

1. Mempertahankan tingkat efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi dengan memilah sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dalam perumusan rencana kebijakan dengan pemangku kepentingan lainnya seperti pedagang, masyarakat dan lembaga kebudayaan Betawi. Mengingat terdapat inovasi yang terlihat kurang bermanfaat bagi sasaran tujuan kebijakan.
2. Melakukan stabilitas dalam pelaksanaan operasional kegiatan pengelolaan dengan SOP kerja, dikarenakan stabilitas dan lingkungan yang kaku dan tidak fleksibel. Efisiensi yang diterapkan sebagai realisasi kebijakan revitalisasi dapat di laksanakan dalam pembangunan sarana dan prasarana dengan melakukan observasi lapangan kepada yang membutuhkan.
3. Pembenahan terkait kecukupan sarana dan prasarana, pihak Unit Pengelola Kawasan dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau stakeholders lain dalam kelengkapan sarana atau fasilitas pengunjung. Selain itu dapat berkolaborasi dengan pihak lembaga kebudayaan dalam menyediakan kebutuhan akan sejarahwan Budaya Betawi.
4. Meningkatkan kerjasama antar pegawai untuk memberluas jangkauan promosi wisata budaya dengan memanfaatkan

media sosial lainnya. Pihak UPK PBB juga dapat memberikan edukasi secara *online* kepada masyarakat luas sebagai daya tarik wisata budaya. sosial media di era saat ini berkembang sangat pesat, sehingga media promosi dapat lebih ditingkatkan dengan pembuatan konten-konten video menarik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Ahmed, A. A., Ahmed, S. I., & Atiyah, S. M. (2020). Impact of six sigma methodology and strategic thinking on operational performance of tourism operations. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 9(2), 1–17. <https://scholar.archive.org/work/rjekdvfsfabnapfyolzaoiq7i/access/wa-yback/>  
[https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article\\_21\\_vol\\_9\\_2\\_2020\\_iraq.pdf](https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_21_vol_9_2_2020_iraq.pdf)
- Alifah, N. N. (2022). *10 Suku dengan Populasi Terbanyak di Indonesia, Jawa dan Sunda Mendominasi*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/10-suku-dengan-populasi-terbanyak-di-indonesia-siapa-saja-CrSI0>
- Barnsley, J., & Ellis, D. (1992). *Research For Change Participatory Action Research For Community Groups*. The Woman's Research Centre.
- Bodgan, R. . ., & Taylor. (2002). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Usaha Nasional.
- Cahyanti, K. D., & Prayogi, L. (2023). Kajian Evaluasi Revitalisasi Kampung Betawi di Setu Babakan, Jakarta Selatan. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.32315/jlbi.v12i1.68>
- Chang, B., Ding, X., Xi, J., Zhang, R., & Lv, X. (2023). Spatial-Temporal Distribution Pattern and Tourism Utilization Potential of Intangible Cultural Heritage Resources in the Yellow River Basin. *Sustainability (Switzerland)*, 15(3), 2611. <https://doi.org/10.3390/su15032611>
- Chen, J. (2022). The Revitalization of Rural Tourism Based on the Psychology of Sports Tourists. *Psychiatria Danubina*, 34(1), 805–807. <https://hrcak.srce.hr/file/401643>
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). Gajah Mada University Press.
- Firdaus, F., Purwantiasning, A. W., & Prayogi, L. (2018). Revitalisasi Kawasan Kota Tua Jakarta Dengan Alternatif Konsep TOD. *Jurnal Arsitektur PURWARUPA*, 2(1), 35-44.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Pustaka Ilmu Group.
- Ihsan, M., & Siregar, A. P. (2020). Peran Preferensi Memediasi Pengaruh Revitalisasi Produk Wisata terhadap Keputusan Berkunjung Objek Wisata Danau Sipin Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 100–105. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.129>
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. BPFE Yogyakarta.
- Kelfaoui, A., Rezzaz, M. A., & Kherrou, L. (2021). Revitalization of mountain rural tourism as a tool for sustainable local development in kabylie (Algeria). The case of yakouren municipality. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 34(1), 112–125. <https://doi.org/10.30892/gtg.34115-626>
- Kim, H., & Kim, E. J. (2021). Tourism as a key for regional revitalization?: A quantitative evaluation of tourism zone development in japan. *Sustainability (Switzerland)*, 13(13), 7478. <https://doi.org/10.3390/su13137478>
- Nurhadi, F. D. C., Mardiyono, & Rengu, S. P. (2021). Strategi pengembangan pariwisata oleh pemerintah daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 325–331. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/190566>
- Pasolong, H. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Pradini, G., Demolinggo, R. H., & Nugroho, A. M. (2021). Jenis partisipasi masyarakat di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan dalam bentuk pariwisata berbasis masyarakat. *Turn Journal*, 1(2), 38–58. <https://journal.unas.ac.id/index.php/turn/article/download/1432/1055>

- Rachmawati, A., & Alhazami, L. (2022). Strategi Pemulihan Ekonomi Pada Bidang Pariwisata di Era New Normal DKI Jakarta Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Media Nusantara Citra. *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 1–19. <http://bisnisan.nusaputra.ac.id>
- Razak, A., & Suprihardjo, R. (2013). Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu di Kepulauan Seribu. *Jurnal Teknik Pomits*, 2(1), 2337–3539. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=54277&val=4186>
- Riyanto, Y. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Penerbit SIC.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Implementasi kebijakan publik: transformasi pikiran George Edwards*. Lukman Offset : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Tauhid, T., Argubi, A. H., Ramadhoan, R. I., & Kamaluddin. (2020). Revitalisasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Kota Bima. *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.32528/sw.v3i1.3369>
- Timothy, D. J., & Tahan, L. G. (2020). Archaeology and Tourism: Consuming, Managing and Protecting the Human Past. In *Archaeology and Tourism*. Channel View Publications.
- Wu, Y. (2021). Theoretical definition and evaluation of marine cultural resources from the perspective of rural revitalization: a literature review. *Environment, Resource and Ecology Journal*, 5(2), 49–52. <https://doi.org/10.23977/erej.2021.050211>
- Ying, Z. (2020). Research on Guangdong Tourism Resources Development and Integration Development under the Background of Rural Revitalization Strategy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 546(3), 032013. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/546/3/032013>
- Zuldafrial. (2012). *Penelitian kuantitatif*. Media Perkasa.